

**PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBANGUNAN JALAN DI  
DESA PULAU GAMBAR KECAMATAN SERBAJADI KABUPATEN  
SERDANG BEDAGAI**

**SKRIPSI**



**OLEH:**

**LIFIA ASTRINA**

**198510057**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**MEDAN**

**2023**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 17/4/24

Access From (repository.uma.ac.id)17/4/24

**PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBANGUNAN JALAN DI  
DESA PULAU GAMBAR KECAMATAN SERBAJADI KABUPATEN  
SERDANG BEDAGAI**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar**

**Sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

**Universitas Medan Area**



**OLEH**

**LIFIA ASTRINA**

**198510057**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**MEDAN**

**2023**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 17/4/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area



Access From (repository.uma.ac.id)17/4/24

## LEMBAR PENGESAHAN

NAMA : Lifia Astrina  
NPM : 198510057  
JUDUL : PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMERATAAN  
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA PULAU  
GAMBAR KECAMATAN SERBAJADI KABUPATEN  
SERDANG BEDAGAI

Disetujui oleh,

Pembimbing I Pembimbing II



Dr. Rudi Salam Sinaga, S.Sos, M.Si Khairunnisah Lubis, S.Sos.M.I.Pol

Tanggal \_\_\_\_\_ Tanggal \_\_\_\_\_

Mengetahui,

Dekan Ketua Program Studi,

Facultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,



Dr. Effiati Juliana Hasibuan, M.Si Dr. Novita Wulandari, S.ST., M.Si

Tanggal \_\_\_\_\_ Tanggal \_\_\_\_\_

## HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumber nya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



Medan, Juli 2023

  
Lifia Astrina  
198510057

METERAL TEMPEL  
C65AJX435625977

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Lifia Astrina

NPM 198510057

Program Studi : Ilmu Pemerintahan Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non – exclusive Royalty – Free Right*)** atas skripsi saya yang berjudul: Peran Pemerintah Desa Dalam Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Di Desa Pulau Gambar Kecamatan Serbajadi Kabupaten Serdang Bedagai.

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media /format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis /pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, Juli 2023

Yang menyatakan

  
D3B33AJX435625974 Lifia Astrina

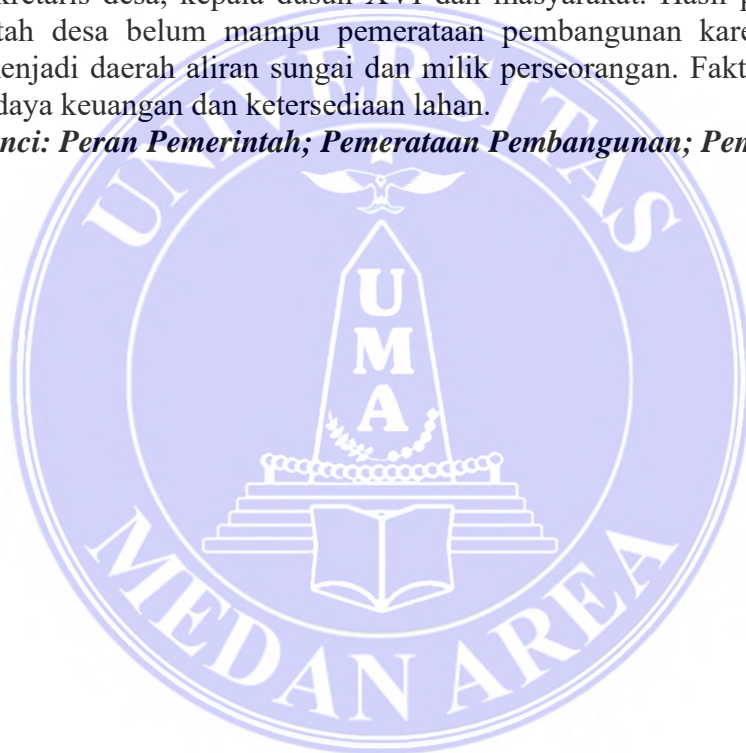
198510057

## ABSTRAK

### PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMERATAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA PULAU GAMBAR KECAMATAN SERBAJADI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurangnya pembangunan infrastruktur di Desa Pulau Gambar. Tujuannya adalah untuk memahami peran pemerintah desa dalam pemerataan pembangunan infrastruktur. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teori Soekanto (2012:212). Teknik pengumpulan data: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, kepala dusun XVI dan masyarakat. Hasil penelitian peran pemerintah desa belum mampu pemerataan pembangunan karena wilayahnya sudah menjadi daerah aliran sungai dan milik perseorangan. Faktor penghambat: sumber daya keuangan dan ketersediaan lahan.

***Kata Kunci: Peran Pemerintah; Pemerataan Pembangunan; Pemerataan Jalan***

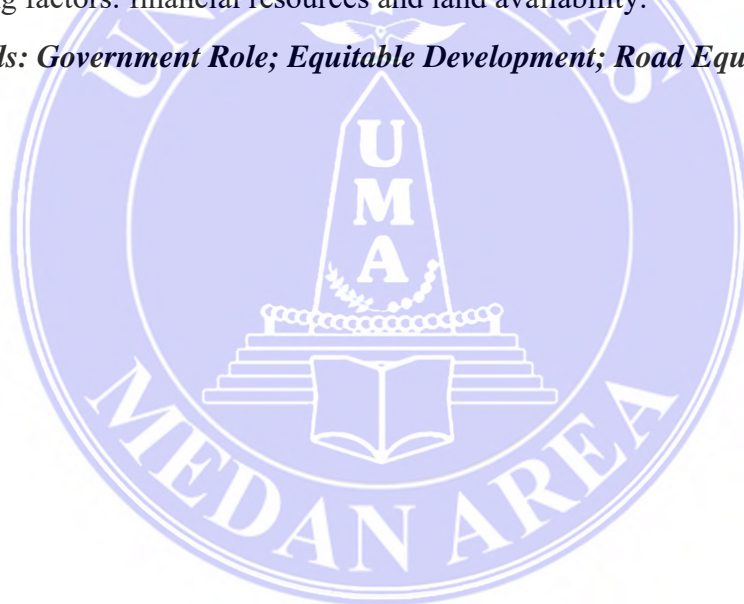


**ABSTRACT**

**THE ROLE OF VILLAGE GOVERNMENT IN EQUITABLE  
DISTRIBUTION OF INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT IN  
PULAU GAMBAR VILLAGE SERBAJADI DISTRICT  
SERDANG BEDAGAI REGENCY**

The background of the research is the lack of infrastructure development in the image island village. The aim is to understand the role of village government in improving infrastructure development. Qualitative research method with soekanto theory (2012: 212). Data collection techniques: observation, interviews, and documentation. The research informants consisted of the village head, village secretary, head of hamlet XVI and the community. The results of the research on the role of village government have not been able to equalize development because the area has become a watershed and belongs to individuals. Inhibiting factors: financial resources and land availability.

***Keywords: Government Role; Equitable Development; Road Equalization.***



## RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Lifia Astrina, anak dari Bapak Sumarang Situmorang dan Ibu Roida Sirait. Penulis lahir di Jakarta 10 September 2000. Penulis merupakan anak ke-3 dari 4 bersaudara.

Penulis menempuh pendidikan di Sekolah Dasar (SD) Negeri Kedaung Kali Angke 08 Pagi, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta dan lulus tahun 2012. Kemudian Penulis melanjutkan Pendidikan di SMP Swasta Pembangunan Galang, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang dan lulus pada Tahun 2015. kemudian melanjutkan Pendidikan di SMA Negeri 1 Galang, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang dan lulus tahun 2018. Setelah itu pada tahun 2019 Penulis melanjutkan Pendidikan Kuliah di Universitas Medan Area.





## KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan hikmat dan kebijakan serta rahmat karunia-Nya sehingga penulis memperoleh kemudahan dalam Menyusun dan menyelesaikan Seminar Hasil ini dengan baik. Seminar Hasil ini berjudul “Peran Pemerintah Desa Dalam Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Di Desa Pulau Gambar Kecamatan Serbajadi Kabupaten Serdang Bedagai”.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan Seminar Hasil ini masih banyak kekurangan dan kelemahan, hal ini disebabkan karena keterbatasan ilmu dan pengalaman yang penulis miliki. Oleh karena itu kritikan dan bimbingan penulis harapkan dari semua pihak untuk kesempurnaan skripsi ini. Dalam penyelesaian Skripsi ini tidak terlepas bantuan dari berbagai pihak, maka dari itu penulis mengucapkan banyak terimakasih atas segala bantuan yang diberikan terutama kepada:

1. Rektor Universitas Medan Area Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M. Eng, Sc.
2. Ibu Dr. Effiati Juliana Hasibuan, M. Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
3. Ibu Dr. Novita Wulandari, S.ST, M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
4. Dr. Rudi Salam Sinaga, S.Sos, M.Si selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan dan pengarahan dalam penyusunan dan pelaksanaan proposal skripsi.

5. Ibu Khairunnisah Lubis, S.Sos, M.I.Pol selaku pembimbing II yang telah memberikan banyak saran dalam penyusunan dan penyempurnaan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu dan informasi dalam mengajarkan materi perkuliahan.
7. Pengurus Kantor kepala desa Pulau Gambar Kecamatan Serbajadi Kabupaten Serdang Bedagai.
8. Khususnya kedua orang tua saya yaitu bapak saya Sumarang Situmorang dan Mama Saya Roida Sirait yang tercinta yang telah membesarkan dan mendidik dengan penuh kasih sayang hingga saat ini, serta dukungan doa yang tiada henti-henti yang diberikan oleh kedua orang tua penulis beserta materi yang selalu diusahakan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Khususnya Kakak, Abang, serta Adik saya yang tercinta yang selalu memberi semangat dukungan doa yang tiada henti-hentinya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Khususnya kepada pemilik Npm 17520131 yang telah memberi semangat, bantuan, masukan, serta dukungan doa yang tiada henti-henti, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
11. Seluruh rekan-rekan Ilmu Pemerintahan serta rekan – rekan seperjuangan yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang telah memberikan dorongan kepada penulis.

12. Untuk Sahabat - sahabat seperjuangan saya selama berada jauh dari orang tua khususnya Siti Nurica Tumangger dan Kristina Sinaga yang telah memberikan banyak hal tentang kehidupan mendorong dan memberikan motivasi, Semangat terhadap penulis beserta masukan untuk terus berusaha dalam penyelesaian skripsi ini terhadap penulis.



Medan, Februari 2023



Lifia Astrina

NPM: 198510057

## DAFTAR ISI

### ABSTRAK

RIWAYAT HIDUP ..... vii

KATA PENGANTAR..... viii

### DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR..... xiii

DAFTAR TABEL..... xiv

DAFTAR LAMPIRAN ..... xv

### BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang ..... 1

1.2 Rumusan Masalah ..... 7

1.3 Pembatasan Masalah ..... 8

1.4 Tujuan Penelitian ..... 8

1.5 Manfaat Penelitian ..... 9

### BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Uraian Teori ..... 10

2.1.1 Defenisi Peran ..... 10

2.1.1.1 Berbagai sifat peran ..... 14

2.1.2 Konsep Pemerintahan Desa ..... 15

2.1.3 Pemerataan Pembangunan Infrastruktur ..... 20

2.1.4 Penelitian Terdahulu ..... 29

2.1.5 Kerangka Berpikir ..... 32

### BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian ..... 33

3.1.1 Deskriptif - Kualitatif ..... 33

3.2 Fokus Penelitian ..... 34

3.3 Lokasi Penelitian ..... 34

3.4 Informan Penelitian ..... 34

3.5 Teknik Pengambilan Data ..... 36

3.6 Analisis Data ..... 37

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

4.1 Deskripsi Atau Karakteristik Lokasi Penelitian .....	38
4.1.1 Gambaran Umum Desa Pulau Gambar .....	38
4.2 Hasil Penelitian .....	43
4.2.1 Hasil Wawancara .....	43
4.2.2 Pembahasan .....	47
4.2.2.1 Peran Pemerintah Desa Dalam Pemerataan Pembangunan Di Desa Pulau Gambar .....	47
4.2.2.2 Faktor Penghambat Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Jalan Antar Desa .....	65

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

5.1 Kesimpulan .....	68
5.2 Saran .....	69

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>70</b>
-----------------------------	-----------



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Jalan Dusun XVI Desa Pulau Gambar .....	7
Gambar 2.1 Skema Kerangka Berpikir .....	34
Gambar 4.1 Peta Wilayah Desa Pulau Gambar.....	44
Gambar 4.2 Foto Wawancara Bersama Informan 1 Bapak Suriadi sebagai Kepala Desa .....	58
Gambar 4.3 Foto Wawancara Bersama Informan 2 Bapak Edy Prayitno sebagai Sekretaris Desa.....	59
Gambar 4.4 Foto Wawancara Bersama Informan 3 Ibu R. Sirait sebagai Masyarakat .....	62
Gambar 4.5 Foto Wawancara Bersama Informan 4 Bapak N. Manurung sebagai Masyarakat .....	63
Gambar 4.6 Foto Wawancara Bersama Informan 5 Ibu Tiarma Br. Manurung sebagai Kepala Dusun XVI .....	64

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terahulu .....	30
Tabel 3.1 Narasumber Penelitian .....	38
Tabel 4.1 Daftar Sumber Daya Pembangunan.....	46



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Observasi .....	73
Lampiran 2 Pedoman Wawancara .....	75
Lampiran 3 Dokumentasi Penelitian .....	76
Lampiran 4 Surat Pengantar Riset.....	81
Lampiran 5 Daftar Riwayat Hidup Singkat .....	82





# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Indonesia adalah negara yang memiliki ribuan pulau, oleh karenanya disebut sebagai negara kepulauan (nusantara). Pengertian Nusantara berasal dari bahasa jawa kuno, yaitu Nusa berarti pulau dan antara berarti hubungan, jadi Nusantara berarti rangkaian pulau (Adolf Heuken, 2002).

Peraturan otonomi daerah memberikan kebebasan setiap daerah untuk mengelola sumber daya yang ada pada daerah tersebut, misalnya pengembangan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Pemberian otonomi seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Setiap daerah mempunyai kebutuhannya sesuai dengan kondisi wilayah dan letak geografisnya. Pada hakikatnya, proses perubahan yang secara sengaja dilaksanakan dan direncanakan dengan bertahap pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Filosofi ini seiring dengan urgensi negara untuk mencapai masyarakat yang adil, sejahtera, seimbang secara material dan spiritual berdasarkan Pancasila.

Negara melakukan pembangunan lewat pemerintah dan masyarakat di berbagai bidang dalam rangka meminimalkan atau bahkan menghilangkan keterbelakangan dan kemiskinan yang masih diderita oleh sebagian masyarakat, terutama yang tinggal di perkotaan atau pedesaan. Pada dasarnya, cita-cita masyarakat yang adil dan makmur merupakan wujud nyata

dari pembangunan nasional yang berpedoman pada Pancasila yang merdeka, berdaulat, bersatu, serta kekuasaan berada di tangan rakyat dalam negara yang aman, damai dan suasana kehidupan berbangsa, hidup rukun dan tentram, serta dalam pergaulan hidup yang merdeka, ramah, rukun, tenang.

Seperti yang terdapat pada Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi:

“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu

susunan Negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Ditinjau dari pembangunan infrastruktur, khususnya jalan, semua daerah memiliki kebutuhan yang besar. Infrastruktur berperan penting dalam mentransformasi kemakmuran daerah dan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur berperan dalam pembangunan wilayah dan perkotaan, seperti pada kontribusi ekonomi, sosial dan lingkungan yang sangat penting.

Servena dan Calderon dalam jurnal BPPK (2018: 75) mengatakan, Infrastruktur koneksi jalan di Indonesia didominasi oleh prasarana transportasi darat serta peranan strategis memegang hal penting dalam mendukung perekonomian, sosial dan budaya, pertahanan dan keamanan negara, sehingga fungsinya harus dijaga sebaik mungkin melalui sistem penjagaan yang layak. Pertumbuhan ekonomi negara didorong oleh peran infrastruktur. Dengan adanya infrastruktur yang terpenuhi tentu peningkatan kecepatan dan pemerataan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Pemerataan pembangunan akan mendorong investasi baru, menciptakan peluang bekerja dan dengan perlahan mampu menaikkan pendapatan masyarakat.

Dalam Undang – Undang nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, bahwa:

“Peran infrastruktur jalan adalah sebagai bagian prasarana transportasi yang mempunyai peran penting dalam bidang

ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan, serta di dipergunakan sebesar - besarnya untuk kemakmuran rakyat. Selain itu jalan sebagai prasarana distribusi barang dan jasa merupakan urat nadi bagi kehidupan masyarakat.”

Desa Pulau Gambar adalah suatu desa yang terletak di wilayah kecamatan Serbajadi kabupaten Sedang Bedagai, Sumatra Utara, Indonesia. Desa Pulau Gambar terdiri dari 16 dusun, Garis batasnya terletak di kabupaten yaitu sungai ular pulau gambar. Sebelum dilakukan pemekaran, Desa Pulau Gambar termasuk kedalam Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2003, tentang pembentukan Kabupaten Serdang Bedagai mengalami pemekaran yang berpisah dari Kabupaten Deli Serdang. Perihal pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai, Desa Pulau Gambar tergolong ke dalam Kabupaten Serdang Bedagai. Hal ini tercantum di Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2006 tentang Perubahan Nomenklatur Kecamatan Bangun Purba menjadi Kecamatan Silinda dan Kecamatan Galang berubah ke Kecamatan Serba Jadi, Desa Pulau Gambar masuk dalam wilayah administrasi Kecamatan Serba Jadi.

“Desa Pulau Gambar adalah Desa dengan luas 1.111 Ha yang pembangunan insfratrukturnya tidak mudah dan perlu peran serta dari seluruh unsur Masyarakat yang ada di Desa Pulau Gambar. Pada saat ditemui di Kantor Desa pada 12 / 12 / 2017 , Kepala Desa Pulau Gambar (Bapak Mimbar) menjelaskan bahwa Pemerintah

Desa terus melakukan Pembangunan Sarana dan Prasarana Umum baik yang menggunakan Dana Desa maupun Dana dari Kabupaten. Pada Tahun 2017 ini, Pemerintah Desa telah melakukan Peningkatan kapasitas Jalan dengan Cor Beton sepanjang  $\pm 2.110$  M di tiga titik Jalan Desa Pulau Gambar yaitu di Dusun III , XII , dan Dusun XVII dengan menggunakan Dana Desa dan Pembangunan Drainase Jalan yang menggunakan Dana Kabupaten. Bapak Riadi (36), selaku Kaur Pembangunan juga menambahkan “peningkatan kapasitas jalan dengan cor beton dan Pembangunan Drainase ini diharapkan dapat menunjang kelancaran aktivitas masyarakat, dan laju ekonomi di Desa Pulau Gambar" dan pemerintah Desa Pulau Gambar berharap peran aktif dari masyarakat demi mensukseskan pembangunan tersebut”.

Sesuai dengan artikel yang diberitakan pada tanggal 28 November 2017 oleh *pulaugambar.web.id website* resmi Desa Pulau Gambar, kepala desa mengatakan terus melakukan pembangunan sarana dan prasarana umum, dan pada tahun 2017, pemerintah desa telah melakukan kapasitas jalan dengan Cor Beton sepanjang  $\pm 2.110$  M di tiga titik Jalan Desa Pulau Gambar yaitu di Dusun III , XII , dan Dusun XVII dan melakukan pembangunan Drainase. Namun hingga saat ini, pada tahun 2022 masih ada salah satu jalan di desa Pulau Gambar yang belum tersentuh oleh pembangunan terutama pembangunan jalan.

Merujuk pada gambaran tersebut maka yang fokus dilirik pada studi ini adalah bagaimana peran pemerintah itu dalam melakukan pemerataan pembangunan. Kurangnya pemerataan pembangunan seperti halnya yang terjadi di Desa Pulau Gambar Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai, dimana terdapat satu jalan yang sejak tahun 1900-an tidak tersentuh oleh pembangunan dari pemerintah. Ketidakseimbangan yang terjadi dalam pembangunan infrastruktur, khususnya di Desa Pulau Gambar Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai, termasuk didalamnya pemerataan pembangunan jalan didesa pada saat observasi awal ditemukan, bahwa pembangunan infrastruktur tersebut belum semua terealisasi secara merata.

Pelaksanaan program pemerataan pembangunan infrastruktur tentunya masyarakat sangat berharap, terutama pada jalan tani. Jalan pertanian yang belum selesai masih berupa tanah, sehingga pada musim hujan menyulitkan petani untuk beroperasi, dan tentunya mempengaruhi perekonomian masyarakat, karena sebagian besar masyarakat yang bekerja adalah petani di Desa Pulau Gambar.

## 1.2 RUMUSAN MASALAH

Kegiatan penelitian ini tentunya harus dilengkapi oleh perumusan masalah, sangat penting agar penelitian tersebut terarah, sesuai dengan lajunya. Merujuk pada latar belakang diatas, maka penulis mengkonsep rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran pemerintah desa dalam pemerataan pembangunan infrastruktur jalan antar dusun di Desa Pulau Gambar Kecamatan Serbajadi Kabupaten Serdang Bedagai?

2. Apa yang menjadi faktor penghambat pemerataan pembangunan infrastruktur jalan antar desa didesa Pulau Gambar kecamatan Serbajadi kabupaten Serdang Bedagai?

### 1.3 PEMBATASAN MASALAH

Dalam suatu penelitian pembatasan masalah sangat penting, perlu adanya batasan masalah, yang bertujuan supaya batas garis penelitian lebih tampak, fokus, dan lebih spesifik. Berikut uraian dari batasan masalah, di antaranya:

- a. Peran pemerintah desa dalam pemerataan pembangunan infrastruktur jalan khususnya desa Pulau Gambar kecamatan Serbajadi Kabupaten Serdang Bedagai.
- b. Menjelaskan apa hambatan pemerintah desa dalam melaksanakan pemerataan pembangunan infrastruktur jalan, didesa Pulau Gambar kecamatan Serbajadi kabupaten Serdang Bedagai.

### 1.4 TUJUAN PENELITIAN

Studi ini pastinya memiliki *output* (hasil) dari kegiatan penelitian yang akan dilakukan. Maksud dari tujuan studi ini adalah memberikan data atau dokumen mengenai apa yang akan diperoleh setelah semua prosuder dilakukan Hasan (2002:44). Dari uraian diatas dan bepedoman pada rumusan masalah maka penelitian ini bertujuan yakni:

- a. Untuk memahami bagaimana peran pemerintah desa dalam pemerataan pembangunan infrakstruktur jalan, khususnya pada Desa Pulau Gambar Kecamatan Serbajadi Kabupaten Serdang Bedagai

- b. Untuk memahami apa faktor Penghambat Pemerintah Desa dalam Melakukan Pemerataan Infrastruktur Jalan, di Desa Pulau Gambar Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai.

## 1.5 MANFAAT PENELITIAN

Setelah tujuan tersebut tercapai, harapan peneliti pada studi ini memberikan manfaat lain yaitu:

- a. Manfaat Praktis

Studi ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi atau masukan kepada kepala desa dari hasil ilmu pemerintahan terkait pemerataan pembangunan infrastruktur jalan sehingga tidak menimbulkan disparitas antar dusun dan tidak menghambat kelancaran aktifitas ekonomi disana khususnya bagi kalangan tani

- b. Manfaat Akademis

Dari aspek teoritis, studi ini bermaksud untuk mengetahui gambaran realita pemerataan pembangunan infrastruktur jalan antar dusun, yang mengarah kepada peran pemerintah desa.



## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 URAIAN TEORI**

Dasar pemikiran untuk berpikir tentang pemecahan masalah harus ada beberapa panduan yang di dukung melalui teoritis. Oleh karena itu, perlu dikembangkan konsep dan teori untuk penelitian. Berdasarkan rumusan tersebut, peneliti akan memaparkan teori, pendapat, ide dan konsep sebagai titik tolak pemikiran penelitian ini.

##### **2.1.1 Definisi Peran**

Peran tersebut menjadi dasar dan menjadi alat penting bagi kota madya untuk mewujudkan potensinya, berpartisipasi aktif dalam pemerintahan dan menikmati keuntungan politik. Peran pemerintah desa merupakan salah satu faktor yang mendukung keberhasilan rencana pembangunan desa.

Istilah peran banyak digunakan dan sering kita dengar istilah peran dalam kaitannya dengan status atau kedudukan seseorang. Sarlito berpendapat (2015: 212), peran dalam ranah sosiologi menggunakan kombinasi dari berbagai teori, arah dan disiplin ilmu. Berbeda di dunia teater, peran memiliki definisi di mana seorang aktor harus memainkan peran dan menciptakan perilaku tertentu, dalam hal ini kedudukan aktor sesuai dengan kedudukan masyarakat, dan kedudukan keduanya sederajat.

Soekanto (2012: 212) mengemukakan, pentingnya peran adalah aspek yang bergerak dari posisi (status). Apabila seseorang memiliki kewajiban di

bawah sikapnya, ia akan memainkan peran ini. Karakter adalah pekerjaan yang dilakukan seseorang sesuai dengan identitasnya. Meskipun tindakan masing-masing karakter didasarkan pada statusnya, mereka masih dalam koridor dengan keteraturan yang berbeda, sehingga menghasilkan hasil yang berbeda untuk karakter setiap orang.

Teori peran adalah teori yang digunakan dalam sosiologi, psikologi dan antropologi yang merupakan kombinasi dari berbagai teori, orientasi dan disiplin ilmu. Teori peran berbicara tentang istilah "peran" yang umum digunakan dalam dunia teater, dimana seorang aktor dalam teater harus memainkan karakter tertentu dan dalam posisinya sebagai karakter ia diharapkan untuk berperilaku dengan cara tertentu. Posisi seorang aktor dalam teater dianalogikan dengan posisi seseorang dalam masyarakat, dan keduanya memiliki posisi yang sama.

Permainan peran dalam hal kedudukan, maka dia harus memenuhi hak dan kewajibannya sesuai statusnya. Antara posisi dan peran tentunya ada diferensiasi, ini dilakukan demi kepentingan ilmu pengetahuan. Tidak bisa juga Terpisah karena antara keduanya saling berkaitan erat. Seperti halnya posisi, peran juga memiliki dua arti, masing-masing ada berbagai karakter dari rezim sosial hidupnya. Ini juga berarti bahwa karakter memutuskan apa yang harus dilakukan apa yang dibawanya ke masyarakat dan peluang apa yang diberikannya.

Menurut Kozier Barbara (1999: 50), peran tersebut didasarkan pada kelompok perilaku yang diharapkan dalam sistemnya. Karakter ini dipengaruhi oleh kondisi sosial internal dan eksternal, juga seimbang. Peran merupakan jenis tabiat dengan harapan ada di diri seseorang pada kondisi tertentu. Persona adalah

penggambaran sosial tentang siapa kita dan kita siapa. Sebuah karakter akan bernilai jika dihubungkan dan digunakan untuk berinteraksi dengan orang lain, komunitas sosial yang muncul dalam masyarakat. Peran juga dapat dikatakan sebagai gabungan dari status seseorang di mata masyarakat dan pengaruh yang kuat terhadap lingkungan sosial. Jika seseorang memenuhi tugas dan hak warga negara yang baik, itu berarti dia mencapai peranan, yaitu sebagai warga negara.

Sejatinya, peran bisa diekspresikan sebagai serangkaian perbuatan spesifik yang dihasilkan dari suatu posisi. Seseorang juga dipegaruhi oleh kepribadian bagaimana manajer atas, menengah, dan bawah dalam peran yang sama harus melakukan peran itu. Keberadaan peran muncul dari lingkungan yang tidak sama, peran dan kedudukan merupakan dua sisi yang berkelindan. Menurut Siagian (2012: 212), keberadaan peran berarti bahwa kedudukan merupakan dasar dari setiap tindakan atau peran yang dihasilkan dari beberapa peluang yang diberikan kepadanya di masyarakat.

Peran adalah adaptasi dari fungsi ke masyarakat, pendefinisian peran sebagai suatu proses. Peran ini begitu penting bagi individu dalam masyarakat. Digunakan untuk bertahan hidup, untuk diakui dan memiliki harga diri. Pengertian peran mencakup tiga hal, antara lain:

1. Kebiasaan seseorang di lingkungan tempat tinggalnya, termasuk bagian peran di masyarakat. Oleh karena itu, peran bisa diartikan sebagai aturan-aturan yang menjadi pedoman seseorang dalam ruang publik.
2. Peran adalah seseorang yang melakukan tindakan dalam ruang publik.

3. Dalam ruang publik, struktur sosial menjadi keharusan bagi seseorang untuk berperan di dalamnya.

Soekanto (2002:220) berpendapat bahwa pada saat yang sama, peran ideal dapat diubah menjadi peran yang harus diemban oleh pemegang peran. Misalnya saja, jasa transportasi sebagai salah satu jenis lembaga formal yang bertindak sebagai penegak hukum dan memberikan ketertiban, keamanan, dan pada akhirnya memberikan kesejahteraan masyarakat

Narwoko dan Suyanto (2010:160) mengemukakan, peran mampu mengontrol perilaku personal karena cara peran itu bekerja sebagai berikut:

1. Membagikan arahan pada proses sosialisasi.
2. Warisan tradisi, kepercayaan, nilai, norma dan pengetahuan.
3. Bisa mengintegrasikan kelompok atau komunitas.
4. Menyalakan sistem komando dan kendali sehingga dapat melindungi kehidupan komunal.

Pendapat yang berbeda dijelaskan oleh Sumaryadi (2010: 21), bahwa peran pemerintah sangat penting dalam menciptakan keamanan dasar dengan fokus pada masalah agama dan keyakinan, serta untuk mengendalikan ekonomi dan menjamin keamanan kehidupan sosial. Anggapan Merton bahwa (Raho 2007: 67), peran diinterpretasikan sebagai pola perilaku yang dicita-citakan masyarakat dari mereka yang berada pada posisi spesifik. Banyak karakter disebut set karakter. Oleh karena itu, peran juga diartikan sebagai keutuhan hubungan interpersonal berdasarkan peran seseorang dalam status sosialnya.

Dari beberapa definisi di atas, peneliti memberikan hipotesis bahwa peran adalah sikap atau lakon yang sebagian orang mengharapkannya atau kelompok dari personal yang berposisi atau berstatus tertentu. Watak seseorang juga

mempengaruhi bagaimana peran ini dilakukan. Peran pada dasarnya sama, dan peran manajer senior, manajer menengah, dan manajer bawah adalah sama.

### 2.1.1.1 Berbagai Sifat Peran

#### a. Mengorganisasi / mengatur

Menurut Jim Ife dan Frank Tesoriero, salah satu peran dalam pemberdayaan adalah berorganisasi, yaitu peran yang harus dilakukan oleh pekerja sosial untuk melibatkan kemampuan berpikir masyarakat secara bersama-sama dalam melaksanakan pembangunan, yaitu melalui apa yang perlu diselesaikan tanpa harus melakukannya sendiri. Namun dilakukan bersama-sama untuk memudahkan pekerjaan yang harus diselesaikan.

#### b. Fasilitator

Fasilitator adalah peran yang dilakukan oleh pengembang komunitas dengan memberikan stimulan dan dukungan kepada masyarakat. Peran ini meliputi, pertama membangun kesepakatan, yaitu: membuat perjanjian dengan Jim Ife dan Frank Tesoriero, Community Development. bersama dengan pertemuan forum, di mana perjanjian harus mendapatkan persetujuan dari pihak-pihak yang terlibat. Kedua, menurut Persons jorgensesns dan Hernandez yang dikutip oleh edi Soeharto, terungkap bahwa salah satu peran dalam fasilitator adalah dorongan untuk melaksanakan tugas yang tanggung jawabnya telah terjadi. Dimana dorongan tersebut harus dilakukan agar masyarakat dapat melaksanakan dan selalu memiliki semangat dalam menyelesaikan kegiatan yang sedang berlangsung. Ketiga, mengaktifkan komunitas, menurut Aziz Muslim, bahwa mengaktifkan komunitas adalah salah satu cara untuk memberdayakan komunitas.

### c. Edukasi / Pendidikan

Pendidikan adalah peran pendidikan bagi masyarakat. Dalam pengembangan masyarakat, ada proses pembelajaran berkelanjutan dari masyarakat dan pekerja masyarakat untuk selalu meningkatkan keterampilan dan cara berpikir masyarakat sehingga mereka dapat berkembang dan menjadi lebih baik.

Dalam kehidupan sosial, interaksi dilakukan oleh anggota masyarakat dengan anggota masyarakat. Interaksi di antara mereka semakin dalam setiap hari dan mereka saling bergantung. Apa yang disebut peran muncul dalam kehidupan publik. Peran adalah aspek yang bergerak dari tingkatan seseorang, dan seseorang berperan dalam memenuhi hak dan kewajibannya sesuai dengan tingkatannya. Yang terbaik adalah memahami arti karakter terlebih dahulu untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas, Soekanto (2002:243).

Dalam pendekatan teori peran, ada beberapa kriteria yang mencakup beberapa indikator, misalnya menurut Soekanto (2002: 246).

- a. Peran mencakup kebiasaan yang terjalin erat dengan posisi atau derajat seseorang dalam masyarakat. Dalam pemahaman ini, peran adalah seperangkat hukum yang membimbing pribadi dalam ruang publik.
- b. Peran adalah rancangan tentang apa yang mampu diperbuat pribadi sebagai lembaga dalam ruang publik.
- c. Peran juga digambarkan sebagai karakter individu yang vital bagi tatanan sosial ruang publik.

### 2.1.2 Konsep Pemerintah Desa

Keterangan dari Soemantri (1976:17), bahwa asal kata pemerintah yaitu dari kata perintah yang berarti menyuruh untuk melakukan sesuatu. Kata pemerintah didefinisikan dalam kaitannya dengan suatu tindakan, sehingga secara

etimologis bisa diartikan sebagai suatu tindakan yang berkelanjutan atau kebijaksanaan yang masuk akal (rasional) melalui perencanaan prosedur tertentu untuk bisa tercapai. Sementara itu, di sisi lain berarti bahwa pemerintah adalah respons struktur politik atau perangkat, Yamin (1982: 112).

Mengutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), desa yang dimaksud sebagai satuan wilayah yang didiami oleh banyak keluarga dengan sistem pemerintahannya sendiri (dipimpin oleh seorang kepala desa) atau kumpulan rumah yang berbeda dari kota yang diwakili oleh satu kesatuan. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 menyampaikan bahwa desa didefinisikan sebagai badan hukum masyarakat yang berhak mengatur dan mengurus bagian vital dari masyarakat menurut garis keturunan dan adat istiadat setempat yang ditetapkan oleh sistem administrasi publik dan terletak wilayah kabupaten.

PP No 72 tahun 2005 mengatakan bahwa:

“Desa terbentuk dari prakarsa masyarakat berdasarkan asal – usul dan kondisi budaya masyarakat setempat. Pembentukan desa terjadi karena ada penggabungan beberapa desa atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran 1 desa menjadi 2 desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa telah ada”.

Syarat –syarat terbentuknya desa adalah:

- a. Jumlah penduduk
- b. Luas wilayah
- c. Bagian wilayah kerja
- d. Perangkat Desa

Menurut UU No. 6 tahun 2014 pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa:

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum

yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Pemerintahan Desa merupakan bagian dari Pemerintahan Nasional yang penyelenggaraannya ditujukan pada pedesaan. Pemerintahan Desa adalah suatu proses dimana usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dipadukan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sebelum lahirnya Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Pemerintah Daerah berlaku kebijakan Pemerintah Desa dengan Undang-Undang Pemerintah Desa No. 5 tahun 1979 yang menyatakan bahwa desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Rumusan tersebut memuat konsep hak untuk menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, namun juga disebutkan bahwa desa merupakan organisasi pemerintahan terendah di bawah camat. Pemerintah desa terdiri dari pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah Desa yang dimaksud terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa. Sesuai dengan PP Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa Pasal 29 dijelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa adalah “lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah”. Anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat (PP Nomor 72 Tahun 2005,



Pasal 29). Berdasar PP No 72 tahun 2005 pasal 30 tentang Desa dijelaskan bahwa anggota Badan Permusyawaratan Desa terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama, dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Sedangkan masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah enam tahun dan dapat diangkat atau diusulkan kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit lima orang dan paling banyak sebelas orang dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan desa.

Dalam pemilihan kepada desa, caranya yaitu ditunjuk langsung oleh penduduk desa bagian dari warga negara Republik Indonesia, dan syarat serta tata cara pemilihannya selanjutnya ditentukan dengan peraturan daerah yang berpijak dengan peraturan pemerintah. Seandainya suara terbanyak jatuh kepada calon kepada desa, alhasil akan dikukuhkan sebagai kepala desa. Dalam kesatuan masyarakat hukum, hak tradisional bisa dipakai pada pemilihan kepala desa sepanjang masih ada dan dibenarkan, dan aturan hukum adat setempat yang diatur dalam peraturan daerah diatur dengan aturan pemerintah.

Kepala desa bertugas di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Menurut desa tahun 2005 no. 72 Pasal 14, ada beberapa kekuasaan yang dimiliki oleh kepala desa sebagai berikut:

- a) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
- b) Mengajukan rancangan peraturan desa.
- c) Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.
- d) Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBDesa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
- e) Membina kehidupan masyarakat desa.
- f) f. Membina perekonomian desa. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.

- g) Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundangundangan
- h) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Sementara itu, kepala desa memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut di bawah kepemimpinan pemerintahan desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 PP 72/2005:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
- b. Membina kehidupan masyarakat.
- c. Membina Perekonomian Desa.
- d. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- e. Mendamaikan perselisihan masyarakat desa, mewakili desanya di dalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya.

Menurut para ahli, yang dimaksud dengan pemerintah adalah tatanan wilayah yang harus dikelola, desa adalah wilayahnya serta rakyat yang harus dikelola. Oleh karena itu, pemerintah desa berhak melaksanakan tugas rumah tangganya, yang diakui oleh sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari segi bahasa, kata desa berawal dari kata Sansekerta "Deshi" yang berarti rumah atau tempat pertumpahan darah. Desa merupakan bentuk solidaritas di luar kota. Definisi desa sebenarnya adalah unit konsentrasi penduduk, model pertanian, yang relatif jauh dari kota.

Mengutip dari Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Desa, disebutkan bahwa:

“Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Desa tidak diasosiasikan dengan kecamatan alasannya karena termasuk dari struktur wilayah kabupaten/kota dan desa bukan bagian dari struktur wilayah. Selain dengan kelurahan, desa mempunyai kewenangan atas teritori yang lebih luas. Namun, dalam perkembangannya, desa dapat di naikan tingkatannya ke kelurahan. Pembagian wilayah administrative desa terbagi menjadi berbagai lingkungan, dan desa termasuk bagian dari wilayah kerja pemerintahan desa yang ditentukan dengan peraturan perundang-undangan desa.

Berdasarkan undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang dimaksud Desa adalah:

“kesatuan masyarakat Hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia berada di Daerah Kabupaten.”

### **2.1.3 Pemerataan Pembangunan Infrastruktur**

Pemerataan merupakan suatu proses, perbuatan yang bertujuan pemeratakan untuk mewujudkan keadilan yang merupakan isu penting bagi negara berkembang. Rencana pembangunan daerah yang terus membaik mendorong Indonesia untuk mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi dengan tetap menjaga laju pertumbuhan daerah. Tujuan dari pilar pemerataan pembangunan adalah untuk mengurangi disparitas pendapatan di semua lapisan masyarakat, mempersempit kesenjangan regional dan pemerataan infrastruktur.

Pembangunan diartikan sebagai suatu usaha yang sistematis, berkesinambungan atau berkelanjutan untuk mewujudkan kondisi yang

memberikan berbagai alternatif yang legal bagi terwujudnya pendapat paling manusiawi setiap warga negara, berkaitan dengan konsep pembangunan daerah Anwar (2005:45).

Mengenai pembangunan, para pakar memiliki gagasan lain dalam segi perencanaan. Setiap orang, daerah dan negara memahami perkembangan konsep secara berbeda. Namun, secara universal pembangunan adalah suatu proses membuat perubahan, dan Xianyang (2008:45) memahami pembangunan sebagai “suatu usaha yang sengaja direncanakan dan dilaksanakan atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan arah negara dan pemerintahan menuju modernisasi dalam rangka pembangunan bangsa”.

Lain halnya dengan Efendi (2002:9) yang berpendapat, pembangunan berarti: “Ikhtiar yang dilakukan untuk meningkatkan semua sumber daya secara terstruktur dan berkesinambungan, merata dan adil menurut prinsip efisiensi dan hasil. Sedangkan Siagian (2001: 23) mengutarakan pembangunan adalah Suatu sebab atau hubungan upaya pertumbuhan dan transformasi, yang dengan sengaja dilaksanakan oleh negara, negara, dan pemerintah untuk mencapai modernisasi dalam rangka pembangunan nasional.

Jadi, Poerwadarminta (2002: 88) menuturkan, perubahan ke arah yang lebih baik dan memperbaiki yang sebelumnya, itulah yang dimaksud dengan pembangunan. Sementara itu, konsep pembangunan menurut Suryono (2008:62) adalah upaya terus menerus untuk menempatkan masyarakat secara adil pada tempat dan perannya, yaitu sebagai subyek dan obyek pembangunan, sanggup

mengembangkan dan memperkuat untuk menghubungkan. harmonis, serasi dan dinamis, sementara interior menciptakan keseimbangan.

Proses pembangunan desa merupakan mekanisme yang memadukan aspirasi masyarakat dan partisipasi masyarakat. Seperti yang dikatakan Solekan, kombinasi ini menentukan keberhasilan pembangunan. Prosedur pembangunan desa merupakan komponen yang cocok antara gerak-gerik pelibatan masyarakat dan aktivitas pemerintah.

Pembangunan desa dapat dilihat dari banyak hal, antara lain proses, metode, prosedur, dan gerakan. Inilah yang dikatakan para ahli:

- a. Berfokus sebagai proses perubahan dari metode hidup yang lebih tersusun dan modern. Proses yang dilakukan, yaitu pembangunan desa lebih sadar akan perubahan sosial dan psikologis. Hal ini direfleksikan melalui perkembangan masyarakat dari standar hidup tertentu ke yang prestise, memperhitungkan perubahan sikap dan isu-isu dinamika lainnya, dan ketika perubahan ini direncanakan secara sistematis, penelitian dan tindakan mengambil pendidikan yang bagus.
- b. Sebagai metode yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dengan keterampilan yang dimiliki. Pembangunan desa merupakan cara untuk mewujudkan tujuan tersebut dan hasilnya dalam bingkai merealisasikan masyarakat adil dan sejahtera berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

- c. Secara terprogram meningkatkan mutu kehidupan masyarakat yang sejahtera di pedesaan secara fisik dan mental, dengan fokus pada kegiatan di yang spesifik seperti pendidikan, kesehatan, pertanian, industri rumahan, koperasi, dan perbaikan perumahan. yaitu Sebagai gerakan, karena pada dasarnya semua gerakan dan kegiatan pengembangan usaha ditujukan kepada desa.
- d. Sebagai gerakan pembangunan desa yang berupaya mewujudkan masyarakat yang sejalan dengan keinginan bangsa Indonesia yaitu melahirkan masyarakat adil dan sejahtera berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.
- e. Setelah semua dikatakan dan dilakukan, dapat dipahami bahwa pembangunan desa melibatkan banyak capaian dan bermacam program yang dilakukan oleh staf departemen, pemerintah daerah dan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu dalam pelaksanaan kegiatan tersebut perlu saling mendukung program kegiatan tersebut dan memastikan terlaksananya dengan baik sesuai dengan yang direncanakan, tentu harus ada penyesuaian.

Masalah pembangunan pedesaan adalah rendahnya tingkat aset yang dikuasai oleh daerah pedesaan dikombinasikan dengan ketidakmampuan daerah pedesaan untuk mengakses sumber daya ekonomi seperti tanah/tanah, modal, input produksi, keterampilan dan teknologi, informasi dan jaringan kolaboratif.

Menurut Riyadi dan Bratakusumah (2004:4), Pembangunan adalah pembangunan sebagai perubahan yang menciptakan kondisi nasional dan sosial yang lebih baik dari titik status quo. Tantangan pembangunan pedesaan adalah

jenis pembangunan yang menyentuh “akar rumput”. Oleh karenanya, desa merupakan pusat pembangunan nasional di Indonesia. Maka dari itu, perlu kerjasama dengan organisasi lain, pemerintah, dan masyarakat secara keseluruhan, daripada melakukannya sendiri. Menurut CST, Kansil (2003: 251), dalam melaksanakan pembangunan desa untuk memenuhi harapan perlu memperhatikan beberapa aspek yang juga menjadi ciri dari pembangunan desa itu sendiri. Seperti:

1. Cakupan multi-sektor yang komprehensif dari berbagai segi, baik kemakmuran dan ketentraman, membentuk mekanisme dan sistem implementasi yang terintegrasi di antara berbagai kegiatan negara bagian dan kota.
2. Menyelaraskan tujuan industri dan lokal dengan kebutuhan dasar untuk aksi masyarakat.
3. Keadilan dan pembangunan universal di pedesaan, termasuk desa-desa di sekitar Kelurahan.
4. Pembangunan nasional dan daerah, pembangunan pedesaan dan perkotaan, dengan model integrasi kawasan kecil dan menengah.
5. Memobilisasi partisipasi, inisiatif, dan swadaya masyarakat untuk memungkinkan elemen individu menggunakan teknologi secara tepat waktu.

Perkembangan konsep dapat dipahami secara berbeda oleh setiap individu, setiap daerah dan setiap negara. Namun secara bersama tercapai mufakat, bahwa pembangunan adalah proses perubahan, Riyadi dan Bratakusumah (2005: 3). Kedua ahli seperti Riyadi dan Bratakusma (2005:25) berpendapat mengenai kata “pembangunan” yang ditafsirkan secara berbeda oleh orang, wilayah, dan negara yang divergen. Namun, ada kesepakatan umum bahwa pembangunan adalah proses perubahan.

Kata tersebut dikonsepsi sehingga menjelaskan bahwa pembangunan adalah proses transisi sadar bangsa, bangsa dan pemerintah menuju modernitas yaitu.

Kehidupan yang lebih layak dari sebelumnya, yang mengelilingi seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pada dasarnya pembangunan memiliki tanda-tanda, dan tanda-tanda pembangunan dapat dilihat dari konsep pembangunan itu sendiri. Tanda-tanda pembangunan yang disajikan di sini didasarkan pada tujuh gagasan utama yang diturunkan dari definisi pembangunan Siagian (2008), yaitu:

- a) Perkembangan adalah sebuah proses. Pengembangan berarti serangkaian kegiatan yang berkesinambungan, terdiri dari periode independen di satu sisi, tetapi "bagian" dari sesuatu yang belum pernah tuntas di sisi lain. Banyak cara dalam penggunaan sebagai penentuan tingkatan tersebut. Berdasarkan tempo, pendanaan, atau wujud yang diharapkan.
- b) Usaha yang dengan sadar ditetapkan dan direalisasikan merupakan pengertian yang tepat pada pembangunan. Artinya bahwa, ketika terjun dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara terdapat gerak-gerik yang kelihatannya seperti pembangunan, namun tidak dengan usaha yang maksimal dikarenakan hanya ada kecelakaan atau terburu-buru. Jadinya, tindakan tersebut bukan digolongkan sebagai pembangunan.
- c) Pembangunan tersebut direncanakan dalam jangka panjang, menengah dan pendek. Seperti yang kita ketahui, perencanaan berarti memutuskan apa yang harus dilakukan sekarang, dan hasilnya akan kita panen di waktu yang akan tiba.
- d) Rancangan pembangunan mencakup pentingnya pertumbuhan dan perubahan. Pertumbuhan berusaha meningkatkan kapasitas negara-bangsa untuk berkembang, selain itu juga untuk membenteng kemerdekaan dan kedaulatan.



Perubahan berarti bahwa negara-bangsa harus dapat diprediksi dan proaktif dalam menanggapi tuntutan situasi yang berbeda dari satu era ke era lain, belum termasuk perbedaan situasi yang sulit untuk diperkirakan. Dalam artian, status tidak bisa dipertahankan oleh negara berkembang.

- e) Modernitas merupakan arah yang dicapai disetiap pembangunan. Bagian modernitas diartikan sebagai cara hidup baru yang lebih layak dibanding sebelumnya, pola berpikir yang ilmiah dan sistem budaya yang kuat dan fleksibel.
- f) Pencapaian modernitas harus melalui tahapan pendefinisian kegiatan pembangunan bersifat multi dimensional, artinya modernitas meliputi seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan.
- g) Semua hal tersebut di atas untuk pembangunan bangsa, agar masing-masing negara bangsa mendapat landasan yang lebih kokoh dan eksistensi yang lebih stabil.

Ketika berpikir tentang pembangunan, seringkali kita berpikir untuk menyamakan pembangunan dengan perkembangan, pembangunan dengan modernisasi dan industrialisasi, bahkan pembangunan dengan westernisasi. Namun. Keempat hal tersebut pada dasarnya berbeda karena semuanya memiliki *background*, prinsip dan karakteristik yang divergen, serta prinsip kesinambungan yang divergen, meskipun keseluruhannya mencerminkan perubahan bentuk.

Infrastruktur mengacu pada prasarana, atau segala hal yang memberikan dukungan utama untuk implementasi suatu proses, baik itu bisnis, pengembangan, dll. Dari pengertian di atas, kita dapat memahami bahwa pembangunan

infrastruktur adalah penciptaan suatu perusahaan atau serangkaian kegiatan pertumbuhan dan transformasi yang direncanakan. Prasarana atau segala sesuatu yang menjadi batu loncatan utama dalam menjalankan proses pembangunan, Tjokroamidjojo (1978: 65) Prasarana tentu menjadi vital sebagai salah satu laju pertumbuhan dan pembangunan ekonomi.

Salah satu komponen penting dari sistem pelayanan publik adalah infrastruktur, atau sering disebut sarana dan prasarana fisik. Pada kegiatan sosial, ekonomi, industri, lembaga, masyarakat, sangat memerlukan fasilitas fisik. Aspek sistem energi, transportasi jalan, gedung perkantoran dan sekolah hingga telekomunikasi, rumah ibadah dan jaringan air bersih, semuanya membutuhkan dukungan infrastruktur yang andal.

Untuk lebih memahami ruang lingkup pembangunan infrastruktur dapat dibagi menjadi 3 bagian, Yaitu Nyoman (1991:89-90):

- a. Mengembangkan infrastruktur transportasi di daerah pedesaan untuk menyokong mobilisasi yang lebih besar ke daerah pedesaan, yaitu jalan, jembatan, penambat, serta perahu.
- b. Saluran irigasi sangat mendukung pembangunan infrastruktur di bidang pertanian.
- c. Saran atau fasilitas yang mendukung masyarakat seperti air minum dan sanitasi sangat dibutuhkan masyarakat di pedesaan.

Lalu, pendapat lain dari Kadin Infrastruktur Indonesia-Jetro (2006), pembangunan infrastruktur merupakan strategi untuk memberikan peluang yang lebih besar yaitu. Prinsip dasar penyediaan infrastruktur umum, meliputi:

1. Infrastruktur merupakan katalisator pembangunan. Ketersediaan sarana dan prasarana mampu memajukan akses masyarakat terhadap sumber daya, sehingga menaikkan produktivitas dan efisiensi yang akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi di hampir semua kegiatan masyarakat dan nasional.
2. Infrastruktur terlibat dalam semua aspek. Infrastruktur terlibat dalam semua aspek. Keberadaan pembangunan infrastruktur sangat diperlukan agar pembangunan infrastruktur dapat berfungsi secara optimal.
3. Rencana kebutuhan infrastruktur harus dilaksanakan bersamaan dengan rencana pemerintah negara bagian dan lokal. Dengan melaksanakan desentralisasi fiskal dan kewenangan daerah yang lebih luas, setiap daerah akan terus mewujudkan potensi daerahnya. Oleh karena itu, pembangunan setiap daerah harus didasarkan pada kebutuhan daerah tertentu. Dalam konteks ini, pembangunan infrastruktur berbasis kebutuhan diharapkan dapat meningkatkan perekonomian daerah dan sekitarnya.
4. Prasyarat untuk keberhasilan kemitraan publik-swasta.
5. Perhatian harus diberikan pada aspek keberlanjutan saat menyediakan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur harus didasarkan pada aspek keberlanjutan agar infrastruktur dapat eksis dalam jangka panjang dan ramah lingkungan.
6. Mekanisme penyediaan infrastruktur harus didasarkan pada asas-asas yang menekankan akuntabilitas, transparansi, serta efisiensi dan keadilan.

### 2.1.4 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian yang terkait dengan variabel – variabel yang berpengaruh terhadap pemerataan pembangunan infrastruktur adalah sebagai berikut:

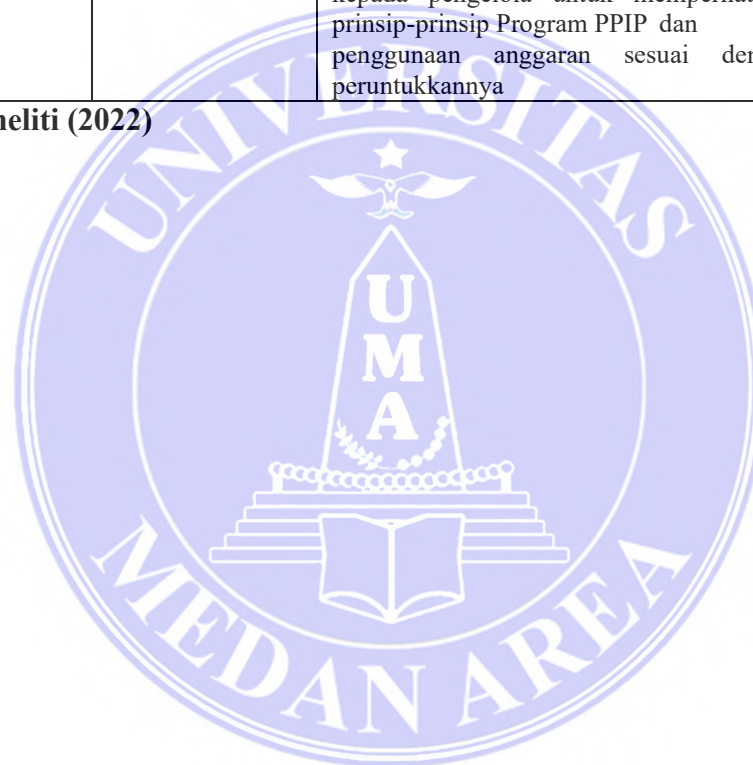
**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

NO	NAMA PENELITI	TAHUN PENELITI	JUDUL	HASIL	PERBEDAAN
1	Wilda Sari	2020	Peran kepala desa dalam pembangunan infrastruktur jalan di desa Kariango kecamatan Lembang kabupaten Pinrang	Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran kepala desa dalam pembangunan infrastruktur di jalan desa sudah cukup baik, namun perlu ditingkatkan agar lebih optimal. hal ini di lihat dari aspek perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemantauan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penelitian terdahulu membahas tentang peran kepala desa dalam pembangunan infrastruktur jalan, sementara penulis membahas tentang peran pemerintah dalam pemerataan pembangunan.</li> <li>• Lokasi penelitian peneliti terdahulu adalah di desa Kariango kecamatan Lembang kabupaten Pinrang, sementara penulis mengadakan penelitian di desa Pulau Gambar kecamatan Serbajadi kabuapaten Serdang Bedagai.</li> </ul>
2	Kepastian Haluana'a dan Walid Mustafa Sembiring	2016	Peran kecamatan dalam pembangunan infrastruktur jalan di kecamatan Beringin kabupaten Deli Serdang.	Dari hasil penelitian ini menjelaskan bahwa peran kecamatan dalam pembangunan infrastruktur jalan di kecamatan beringin kabupaten deli serdang, dimulai dari penyusunan program kegiatan pembangunan yang di adakan di tingkat desa, dimana masing – masing desa melaksanakan Musrenbangdes. peran kecamatan sangat menentukan dalam perencanaan kegiatan prioritas utama yang sangat dibutuhkan masyarakat, karena hasil musrenbang tersebut diajukan kepada SKPD untuk dapat dianggarkan dan di realisasikannya pembangunan tersebut.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penelitian terdahulu membahas tentang peran kecamatan, sementara penulis membahas tentang peran pemerintah desa</li> <li>• Lokasi penelitian peneliti terdahulu adalah di kecamatan Beringin kabupaten Deli Serdang, sementara penulis mengadakan penelitian di desa Pulau Gambar kecamatan Serbajadi kabuapaten Serdang Bedagai.</li> </ul>

3	Irfan	2019	Peran pemerintah desa dalam pembangunan di desa Merbau kecamatan Mendahara kabupaten Tanjung Jabung Timur provinsi Jambi	Terdapat tiga peran pemerintah dalam pembangunan di Desa Merbau Kecamatan mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur, di antaranya: partisipasi, transparansi, dan kesetaraan dan kewajiban; (2) Terdapat dua kendala pemerintah dalam pembangunan di Desa Merbau Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur di antaranya; minimnya partisipasi masyarakat, dan terbatasnya SDM yang memadai.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peneliti terdahulu mengkaji tentang peran pemerintah desa dalam pembangunan, sementara peneliti mengkaji tentang peran pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur .</li> <li>• Lokasi penelitian peneliti terdahulu adalah di desa Merbau kecamatan Mendahara kabupaten Tanjung Jabung Timur provinsi Jambi, sementara penulis mengadakan penelitian di desa Pulau Gambar kecamatan Serbajadi kabupaten Serdang Bedagai.</li> </ul>
4	Junaidi Soamole	2018	Peran pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur di desa Potorono, kecamatan Banguntapan, kabupaten Bantul, Daerah Istimewa	Peran Pemerintah Desa Potorono dalam pembangunan Infrastruktur, dengan Ruang Lingkup sebagai berikut, yang Pertama Perencanaan Pembangunan infrastruktur di Desa Potorono Ada Dalam RPJMDES dan Masyarakat dilibatkan dalam Perencanaan, kedua Pengorganisasian Pemerintah Desa Potorono Membentuk tim Untuk Pelaksanaan Pembangunan Infrastrktur, ketiga Pembangunan Infrastruktur suda ada yang terlaksana dan ada yang belum terlaksana, keempat Pengawasan Pembangunan Infrastruktur di Desa Potorono ada tim dari kabupaten yang mengawasi, kelima faktor penghambat adalah turunya Dana Desa yang terlambat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penelitian terdahulu membahas tentang peran pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur jalan, sementara penulis membahas tentang peran pemerintah dalam pemerataan pembangunan.</li> <li>• Lokasi penelitian peneliti terdahulu adalah di desa Potorono, kecamatan Banguntapan, kabupaten Bantul, Daerah Istimewa, sementara penulis mengadakan penelitian di desa Pulau Gambar kecamatan Serbajadi kabupaten Serdang Bedagai.</li> </ul>
5	Indrasto Wahyudi Dahlan, Anwar Parawangi, Amir Muhiddin	2012	Peranan pemerintah desa dalam pelaksanaan program pembangunan infrastruktur pedesaan (PPIP)	peranan Pemerintah Desa sudah dapat dikatakan berperan aktif dengan indikator yaitu: memfasilitasi yang dimana Pemerintah Desa memberikan fasilitas pada musyawarah desa, transparansi pelaksanaan, dan fasilitas penunjang untuk OMS. Keterlibatan masyarakat yang dimana Pemerintah Desa berusaha dan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peneliti terdahulu membahas tentang peranan, sementara penulis membahas tentang peran.</li> <li>• Peneliti terdahulu membahas tentang pelaksanaan program pembangunan infrastruktur pedesaan, sementara penulis membahas tentang pemerataan pembangunan infrastruktur.</li> </ul>

			di desa Sendana kecamatan Mambi kabupaten Mamasa	bekerja sama dengan pihak pengelola untuk mengutamakan keterlibatan masyarakat; mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan PPIP. Pemerintah Desa melakukan pendekatan kepada pengelola untuk memperhatikan prinsip-prinsip Program PPIP dan penggunaan anggaran sesuai dengan peruntukannya	
--	--	--	--	--	--

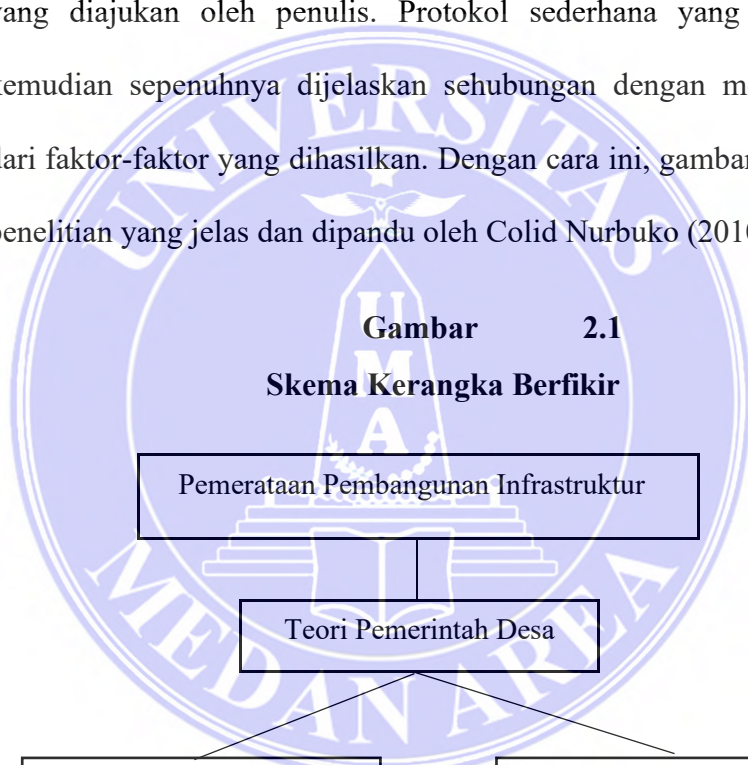
**Sumber: Diolah oleh peneliti (2022)**



### 2.1.5 Kerangka Berpikir

Sugiyono (2017:60) mencoba untuk menjelaskan, Kerangka berpikir adalah acuan konseptual tentang bagaimana teori saling berkaitan dengan berbagai penyebab yang ditelusuri sebagai isu utama.

Skema berpikir diciptakan dalam bentuk diagram yang mudah dipahami mendeskripsikan secara singkat prosedur pemecahan masalah yang diajukan oleh penulis. Protokol sederhana yang dikembangkan kemudian sepenuhnya dijelaskan sehubungan dengan mekanisme kerja dari faktor-faktor yang dihasilkan. Dengan cara ini, gambaran keseluruhan penelitian yang jelas dan dipandu oleh Colid Nurbuko (2010: 140).



**Gambar 2.1**  
**Skema Kerangka Berfikir**

Sumber: Diolah oleh peneliti (2022)

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 JENIS PENELITIAN**

##### **3.1.1 Deskriptif – Kualitatif**

Menurut Miller dan Moleong (2004:3), teknik analisis kualitatif (deskriptif-kualitatif) adalah metode penelitian penggambaran dengan menggunakan teknik analisis data, dan metode penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Penggunaan penelitian kualitatif metode untuk mempelajari keadaan entitas yang alami, di mana peneliti sebagai alat inti dan dikombinasikan dengan metode pengumpulan data. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian ini berorientasi untuk memberikan deskripsi kualitatif dan dapat disajikan dalam tabel atau grafik untuk memastikan kelengkapan, tetapi penelitian ini adalah kata, kalimat, dan deskripsi, dengan sedikit menggunakan data numerik atau rumus data pendukung.

Metode kualitatif adalah teknik analisis yang menghasilkan data berupa teks deskriptif atau beserta gambar atau foto individu yang perilakunya dapat diamati. Kami berharap gambar ini menunjukkan detail, kejelasan dan akurasi dari apa yang terlihat di TKP. Angin sakal khususnya menentang pembangunan jalan raya di Kotapraja Pulau Ganbar, Jalan Selvajadi, Kabupaten Serdang Bedagai. Jangan ragu untuk melakukan penelitian deskriptif kualitatif. Ini berarti bahwa pertanyaan survei yang diajukan bersifat fleksibel dan "dapat berubah tergantung pada alur kerja di lapangan." Fokus penelitian juga berubah untuk memenuhi pertanyaan penelitian yang berubah. Nazir (2003:16) mengatakan Jenis penelitian deskriptif ini dapat digunakan untuk penelitian-penelitian yang perlu mengkaji fenomena sosial secara mendalam.



### **3.2 FOKUS PENELITIAN**

Penelitian berfokus pada apa yang akan dipelajari untuk memperoleh keterangan yang dihimpun, diolah, ditelaah, dan diinterpretasikan sesuai dengan pertanyaan yang diajukan. Prioritas penelitian sangat vital dalam penelitian karena mencegah kebiasaan mempersiapkan dan mendiskusikan pertanyaan penelitian. Kajian ini berfokus pada peran pemerintah dalam pemerataan pembangunan jalan di Desa Pulau Gambar Kecamatan Serbajadi Kabupaten Serbajadi dan apa yang menjadi kendala pemerataan pembangunan jalan di Desa Pulau Gambar Kecamatan Serbajadi Kabupaten Serdang Bedagai.

### **3.3 LOKASI PENELITIAN**

Studi ini dilaksanakan di Desa Pulau gambar Kecamatan Serbajadi Kabupaten Serdang Bedagai. Peneliti memilih lokasi ini sebagai penelitian sekaligus sebagai tempat tinggal peneliti, secara tidak langsung peneliti mengenal daerah tersebut, sehingga hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti dan masyarakat setempat.

### **3.4 INFORMAN PENELITIAN**

Narasumber penelitian adalah mereka yang benar-benar mengerti pertanyaan atau masalah tertentu dan digunakan untuk memberikan bahan yang jelas, akurat, dan dapat dipercaya tentang situasi dan keadaan yang sedang diselidiki dalam bentuk pernyataan dan data yang membantu memecahkan

masalah atau pertanyaan tersebut. Identifikasi informan dilakukan dengan menggunakan purposive sampling, artinya informan yang lebih mengetahui pertanyaan penelitian dipilih secara langsung. Adapun informasi informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.1 Narasumber Penelitian**

NO	NAMA INFORMAN	JABATAN	JUMLAH
1	Suriadi	Pemimpin Desa	1
2	Edi Prayitno	Sekretaris Desa (SEKDES)	1
3	Tiarma Br Manurung	Ketua Lorong/ Pimpinan Dusun	1
4	N. Manurung R. Sirait S. Cibro N. Manik R. Berutu	Masyarakat	5
	Total		8

Keterangan:

1. **Suriadi** merupakan kepala desa di desa Pulau Gambar. Peneliti memilih beliau menjadi informan penelitian dikarenakan statusnya yang penting dan dapat menjadi sumber untuk mendapatkan data – data penelitian.
2. **Edi Prayitno** merupakan sekretaris dari kepala desa, dipilih menjadi informan karena merupakan anggota yang sudah lumayan lama aktif dalam pemerintahan desa Pulau Gambar
3. **Tiarma Br. Manurung** merupakan kepala Lorong di dusun XVI, dipilih menjadi informan karena dusun XVI merupakan fokus dari penelitian ini, maka dari itu kepala Lorong akan lebih mengetahui kondisi lorongnya.
4. **N. Manurung, R. Sirait, S. Cibro, N. Manik, dan R. Berutu** merupakan masyarakat di desa Pulau Gambar. Tokoh masyarakat yang dipilih menjadi informan dikarenakan masyarakat tersebut merupakan masyarakat lama (lahir dan

UNIVERSITAS MEDAN AREA (kesan) di desa tersebut.

Kemudian tokoh masyarakat **N. Manurung** merupakan mantan kepala lorong desa Pulau Gambar dusun XVI.

### 3.5 TEKNIK PENGAMBILAN DATA

Peneliti menggunakan teknik pengambilan data dalam penelitian ini untuk memperoleh narasumber yang akurat atau bahan untuk diinterpretasikan sebagai penelitian oleh masyarakat ilmiah. Metode terbagi menjadi tiga bagian, yaitu: observasi atau pemerhati, wawancara dan pencatatan.

1. Pengamatan, yaitu menghimpun data dari observasi ke lapangan terhadap subjek penelitian untuk mengetahui skema kebijakan pemerintah.
2. Wawancara.

Untuk memperoleh informasi, baik dari percakapan atau berinteraksi secara tatap muka, maka perlu adanya pengumpulan data. Data yang diperlukan harus diberikan kepada informan yang tepat sebagai subjek penelitian.

3. Dokumentasi

Diartikan sebagai catatan bahan dan laporan yang terkait dengan studi. Hal tersebut menjadi bukti atas hasil wawancara di atas. Tindakan yang dilakukan untuk mendapatkan bahan yang diinginkan dengan menjejaki dan meneliti dokumen yang ada. Hal ini untuk memperoleh bahan dan laporan yang berkaitan dengan bahan penelitian. Penelitian kepustakaan dilaksanakan dengan cara mengkaji referensi dan sumber-sumber lain yang tentang objek studi.

### 3.6 ANALISIS DATA

Melakukan dialog aktif pada bagian analisis data kualitatif kemudian diteruskan sampai selesai. Sebelum diinterpretasikan, bahan yang terkumpul harus diolah, yaitu dengan menganalisis data. Marzuki mengemukakan (1983: 87), tujuan dari analisis penelitian ini adalah untuk mempersempit dan membatasi temuan-temuan menjadi suatu kumpulan data yang terorganisir, terstruktur, dan lebih bermakna. Milles dan Huberman (1992:20) menyatakan bahwa analisis data terdiri dari beberapa langkah, antara lain:

1. Reduksi data, suatu opsi yang bertujuan untuk menyederhanakan dan memperhalus catatan lapangan, merupakan salah satu bentuk klasifikasi. Hapus data yang tidak perlu dan mengatur bahan.
2. Pengajuan bahan merupakan prosedur pengumpulan data yang komplit dalam bentuk yang tersusun dan memungkinkan pemetikan intisari dan membuat pilihan.
3. Menyimpulkan atau memverifikasi berarti menarik kesimpulan sementara dari apa yang awalnya kabur, menjadi lebih rinci melalui verifikasi, seolah-olah data yang dihasilkan tidak valid dalam arti merevisi catatan.

Dari ketiga komponen tersebut, semuanya saling berkait erat dan prosesnya bersirkulasi dengan efektif dan untuk memperoleh data dalam studi ini akan disaring untuk digunakan hanya yang relevan dengan penelitian dan kemudian dikumpulkan dan terkait. Kemudian secara sistematis menarik kesimpulan untuk menangkap maknanya.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian – uraian serta dari hasil penelitian dan wawancara yang telah dikemukakan pada bab – bab sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian yang berjudul “Peran Pemerintah Desa Dalam Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Desa Pulau Gambar Kecamatan Serbajadi Kabupaten Serdang Bedagai” yaitu:

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa informan dapat disimpulkan bahwasannya peran pemerintah desa tidak dapat melakukan pemerataan pembangunan jalan Desa Pulau Gambar Kecamatan Serbajadi Kabupaten Serdang Bedagai di dusun XVI dikarenakan wilayah tersebut telah menjadi daerah aliran sungai (DAS) dan milik perseorangan yang sampai saat ini belum bersedia diajak kerja sama oleh pemerintah desa setempat.

Berdasarkan hasil penelitian, konsep pemerintah menurut Soemantri ini tidak berjalan di Desa Pulau Gambar Kecamatan Serbajadi Kabupaten Serdang Bedagai. Hal ini dapat dilihat dari kurangnya suatu tindakan yang berkelanjutan mengenai pemerataan pembangunan infrastruktur. Mulai dari Pemerintah Desa periode-periode sebelumnya sudah melakukan pembangunan infrastruktur hanya saja belum dilakukan diseluruh dusun yang terdapat di Desa tersebut.

Faktor penghambat yaitu Sumber Daya Finansial dimana Tingginya biaya pendanaan, juga muncul sebagai permasalahan dalam pembangunan serta ketidak sesuaian pendanaan dengan kebutuhan pembangunan infrastruktur. Dan Masalah ketersediaan tanah hingga saat ini pemerintah Desa Pulau Gambar Kecamatan Serbajadi Kabupaten Serdang Bedagai belum bisa mendapatkan bagaimana cara untuk melakukan pembangunan di jalan dusun XVI yang merupakan wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) dan milik perseorangan.

## 5.2 SARAN

1. Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintahan harus lebih tegas dan berperan dalam proses peningkatan kinerja perangkat desa agar perangkat desa lebih mempunyai kemauan untuk meningkatkan kinerja sesuai dengan tanggung jawab mereka
2. Pemerintah desa juga harus memiliki kesadaran akan tanggung jawab mereka sebagai pelaksana roda pemerintahan didalam desa
3. Untuk pemerintahan di tingkat kecamatan lebih memperhatikan desa yang kurang pembangunan jalan maupun fasilitas umum lainnya.
4. Untuk aparatur Kantor Desa Pulau Gambar agar lebih memperhatikan pelaksanaan pembangunan, agar pembangunannya dapat menyempurnakan terhadap kekurangan yang terdapat pada Desa Pulau Gambar terutama dalam keadaan jalan.
5. Perlu adanya inisiatif yang tinggi untuk melakukan kerjasama antara pemerintah kabupaten dan pemerintah desa untuk melakukan pembangunan jalan desa.

## DAFTAR PUSTAKA

### **BUKU**

- Barbara, Kozier. 1999. Teori Peran. Yogyakarta: Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Bratakusumah, Deddy Supriady & Riyadi. 2005. Perencanaan Pembangunan Daerah. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Hasan, M. Iqbal. (2002). Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Marzuki, 1983. Metode Penelitian, Jakarta PT Gramedia Pustaka Utama Jaya.
- Miles, M. B. & Huberman, A. M. 1992. Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru, Alih Bahasa T. R. Rohidi. Jakarta: UI Press.
- Moleong, L.J., 2004. Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Muhhammad Yamin. 1982. Pembangunan Desa Dan Masalah Kepemimpinannya. CV.Rajawali, Jakarta.
- Nazir, Moh.,Ph.D., 2003. Metode Penelitian, Jakarta: PT Ghalia Indonesia.
- Nurbuko, Cholid. 2010. Metodologi Penelitian. Bumi Aksara, Jakarta
- Poerwadarminta, W.J.S. 2002. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Balai Pustaka.
- Riyadi Dan Deddy, B., 2004. Perencanaan Pembangunan Daerah: Strategi Menggali Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama
- Siagian.Sondang P. 2012.Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara.
- Siagian, Sondang P. 2008. Adminitrasi Pembangunan. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Soekanto, & Soerjono. (2012). Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soerjono, S., 2002, Teori Peranan, Jakarta: Bumi Aksara.
- S.P Siagian, 2001, Kerangka Dasar Ilmu Administrasi, Rineka Cipta, Jakarta.
- Siagian, Sondang P. 2008. Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi, Dan Strateginya. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif. Anggota Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI), Yogyakarta
- Sumaryadi, I Nyoman, 2010. Kebutuhan Masyarakat Madani, LPMPI. Jakarta.
- Suprastyo, D., & Perdesaan, I. P. P. W. D. Pembangunan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakatnya.
- Suryono, Agus, 2008, Teori Dan Isu Pembangunan, Universitas Negeri Malang, UM Press
- Wirawan Sarwono, Sarlito. (2015). Teori- Teori Psikologi Sosial. Jakarta: Rajawali Pers

## **JURNAL**

- Alaslan, A. (2021). Gaya Kepemimpinan Dan Pembangunan Desa.
- Alokendek, R. C., Kimbal, M. L., & Undap, G. (2017). Peran Pemerintah Desa Dalam Penggunaan Dana Pembangunan Infrastruktur Di Desa Darunu Kecamatan Wori. *Jurnal Eksekutif*, 1(1).
- Baidarus, M., Anggraeni, C. D. N. A., & Mauliza, H. Z. (2018). Optimalisasi Peran BKPM Dalam Meningkatkan Investasi Sektor Infrastruktur Strategis Guna Mendorong Pemerataan Pembangunan. *Jurnal BPPK: Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan*, 11(1), 75-86.
- Dahlan, I. W., Parawangi, A., & Muhiddin, A. (2012). Peranan Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (Ppip) Di Desa Sendana Kecamatan Mambi Kabupaten Mamasa. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(1).
- Dison, R., Suharno, Dan R. S. Sinaga. 2022. Implementasi Persiapan Pemekaran Desa Lubuk Mandarsah Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo Berdasarkan Undang –Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* (4): 11760.
- Hamdan, H. Kusmanto, Adam, R. S. Sinaga. 2021. The Role Of Social Services In Improving Community Welfare In Gayo Lues District (Study Of Elderly Welfare). *Budapest International Research And Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)* (4), 13675.
- Harahap, I. F., S. Ritonga., & R. S. Sinaga. 2021. The Role Of Organizational Culture In Improving Public Services Study Of The One-Stop Administration Office Salak Pakpak Bharat Regency. *Budapest International Research And Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)* Volume 4, No 3. 3454.
- Haryani, D., & Armansyah M., (2016). Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Melati II Kecamatan Perbaungan, *Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 4 (1): 74-85
- Hermayanty, I. (2020). Peran Dinas Kesehatan Dalam Penanggulangan Hiv/Aids Di Kabupaten Sumedang. *Journal Of Regional Public Administration (JRPA)*, 5(2), 24-35.
- Junaidi, S. (2018). Peran Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Potorono Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Luvitasari, M., Adji Murtomo, B., & Rochma Harani, A. (2016). Redesain Terminal Bus Bahurekso Kendal Tipe B (Doctoral Dissertation, Universitas Diponegoro).
- Manopo, R. D., Rondonuwu, A., & Posumah, D. (2022). Peran Kaum Milenial Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Desa Lowian Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Minahasa Selatan Tahun 2020. *Jurnal Eksekutif*, 2(1).
- Nuansa, R., Nuh, M. U., & Saleh, M. S. (2006). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pembangunan Dan Pengeluaran Rutin Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sumatera Selatan (Doctoral Dissertation, Sriwijaya University).



- Pulungan, M. F., N. S. S. Siregar., & R. S. Sinaga. 2021. Analisis Efektivitas Kinerja Bidang Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Pada Kantor Camat Medan Timur Kota Medan. *Perspektif*. 764.
- Simamora, R. K. & R. S. Sinaga. (2016). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Pariwisata Alam Dan Budaya Di Kabupaten Tapanuli Utara. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA*. 80.

### **SUMBER LAINNYA**

- Peraturan-Pemerintah Nomor. 34 Tahun 2005
- Peraturan-Pemerintah Nomor. 57 Tahun 2005 Tentang Desa.
- Peraturan-Pemerintah Nomor. 72 Tahun 2005 Pasal 14.
- Peraturan-Pemerintah Nomor. 72 Tahun 2005 Pasal 19.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999.



LAMPIRAN I  
PEDOMAN OBSERVASI

**PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMERATAAN PEMBANGUNAN  
INFRASTRUKTUR JALAN DI DESA PULAU GAMBAR KECAMATAN  
SERBAJADI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

Berikut adalah pedoman observasi yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian sebagai berikut:

1. Lokasi:  
Lokasi penelitian di Kantor Kepala Desa Pulau Gambar Kecamatan Serbajadi Kabupaten Serdang Bedagai dan Dusun XVI Desa Pulau Gambar,
2. Fasilitas, sarana dan prasarana:  
Fasilitas, sarana dan prasarana di Kantor Kepala Desa Pulau Gambar yaitu ruang tunggu, dan tempat parkir kendaraan.
3. Pelaksanaan kegiatan/program:  
Pelaksanaan kegiatan program di Kantor Kepala Desa Pulau Gambar
4. Respon/ Sikap:  
Respon/ Sikap pegawai di Kantor Kepala Desa Pulau Gambar ramah dan santun serta membantu mencari data apa yang peneliti perlukan.

Instansi : Kepala Desa Pulau Gambar Kecamatan Serbajadi Kabupaten Serdang Bedagai

Nama Program : Pemerataan Pembangunan Jalan Desa Pulau Gambar

Lokasi : Desa Pulau Gambar Kecamatan Serbajadi Kabupaten Serdang Bedagai

Tanggal : 23 November 2022

No.	Yang Diamati	Ya	Tidak	Bukti / Indikator
1	Flyer Instansi / Brosur	✓		Website
2	Struktur Organisasi – Tupoksi	✓		Dilihat pada saat observasi turun lapangan langsung
3	Sikap Pegawai	✓		Baik, ramah, dan sangat membantu
4	Website Instansi	✓		<a href="http://www.pulaugambar.web.id">www.pulaugambar.web.id</a>
5	Sosial Media Instansi	✓		Facebook

6	Sarana dan Prasarana a. Ruang Kerja b. Ruang Tunggu c. Parkir d. Toilet		✓		Dilihat pada saat observasi turun lapangan langsung
---	---	--	---	--	---



LAMPIRAN II  
PEDOMAN WAWANCARA

**PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBANGUNAN  
INFRASTRUKTUR JALAN DI DESA PULAU GAMBAR KECAMATAN  
SERBAJADI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

**IDENTITAS RESPONDEN PERTAMA**

1. Nama : Suriadi
2. Jenis Kelamin : Laki - Laki
3. Umur : 54
4. Pekerjaan : Kepala Desa
5. Pendidikan : -

Pertanyaan – Pertanyaan

4. Apakah pemerintah desa mengikutsertakan masyarakat dalam melakukan perencanaan pembangunan?  
“..tentu kita dalam Rencana pembangunan jangka menengah desa kami melibatkan semua unsur masyarakat baik itu dari masyarakat, aparat TNI serta tokoh adat, tokoh agama kita undang semua datang mengadakan pertemuan di balai desa untuk mendengar aspirasi masyarakat dalam pembangunan..” (hasil wawancara 23 November 2022) .
5. Program apa yang telah dibuat pemerintah desa untuk menjaga pembangunan yang telah dibuat?  
“..pemerintah desa setiap hari jumatnya mengadakan gotong royong yang dimana di kegiatan ini para aparat TNI dan semua tokoh yang telah hadir membantu mengerjakan program-program pembangunan yang telah di rencanakan sebelumnya. Setelah semua program tersebut dilakukan di hari-hari kedepannya kita mengadakan jumat bersih untuk menjaga keutuhan pembangunan yang telah kita kerjakan sama-sama” (hasil wawancara 28 November 2022).
6. Apakah masyarakat sudah merasa puas dengan pembangunan yang telah dibuat oleh pemerintah?  
“..untuk kepuasan masyarakat saya kurang tau pasti, tapikan kami sudah mendengar aspirasinya di wakili oleh beberapa masyarakat beserta kepala dusun/lingkungan jadi kami menyerap semua aspirasi, walaupun ada ketidak puasan ya karena kita memprioritaskan kebutuhan dan kita juga tidak bisa memberikan kepuasan kepada semua orang karena perbedaan kepuasan setiap orang..” (hasil wawancara 28 November 2022).

## IDENTITAS RESPONDEN KEDUA

1. Nama : Edy Prayitno
2. Jenis Kelamin : Laki - Laki
3. Umur : -
4. Pekerjaan : Sekretaris Desa
5. Pendidikan :-

### Pertanyaan – Pertanyaan

1. Apakah pemerintah desa mengikutsertakan masyarakat dalam melakukan perencanaan pembangunan?  
“..tentu kita dalam Rencana pembangunan jangka menengah desa kami melibatkan semua unsur masyarakat baik itu dari masyarakat, aparat TNI serta tokoh adat, tokoh agama kita undang semua datang mengadakan pertemuan di balai desa untuk mendengar aspirasi masyarakat dalam pembangunan..” (hasil wawancara 23 November 2022) .
2. Program apa yang telah dibuat pemerintah desa untuk menjaga pembangunan yang telah dibuat?  
“..pemerintah desa setiap hari jumatnya mengadakan gotong royong yang dimana di kegiatan ini para aparat TNI dan semua tokoh yang telah hadir membantu mengerjakan program-program pembangunan yang telah di rencanakan sebelumnya. Setelah semua program tersebut dilakukan di hari-hari kedepannya kita mengadakan jumat bersih untuk menjaga keutuhan pembangunan yang telah kita kerjakan sama-sama” (hasil wawancara 28 November 2022).
3. Apakah masyarakat sudah merasa puas dengan pembangunan yang telah dibuat oleh pemerintah?  
“..saya yakin pasti tetap ada masyarakat yang tidak puas dengan hasil penyusunan perencanaan pembangunan ini karena tidak semua kita setuju, ada beberapa hal yang menurut kami dan yang lain masih belum perlu pembangunannya..” (hasil wawancara 28 November 2022).

## IDENTITAS RESPONDEN KETIGA

1. Nama : Tiarna Br. Manurung
2. Jenis Kelamin: Perempuan
3. Umur : 43
4. Pekerjaan : Kepala Dusun XVI
5. Pendidikan : SMA

### Pertanyaan – Pertanyaan

1. Apakah pemerintah desa mengikutsertakan masyarakat dalam melakukan perencanaan pembangunan?  
“..iya benar.. memang pak kepala desa biasa mengadakan pertemuan dengan masyarakat, saya juga selaku kepala dusun selalu menyempatkan waktu bersama pak kepala desa mengikuti rencana pembangunan desa,

- melakukan diskusi dan bertanya apa saja yang dibutuhkan masyarakat di lingkungan ini..” (hasil wawancara 25 November 2022).
2. Program apa yang telah dibuat pemerintah desa untuk menjaga pembangunan yang telah dibuat?  
“..program yang dilakukan pemerintah desa untuk menjaga pembangunan yang suah ada di desa yaitu melakukan gotong royong kebersihan yang biasa dilakukan pada hari jumat yang sering disebut dengan jumat bersih, kegiatan ini dilakukan oleh aparat TNI, Perangkat Desa serta Masyarakat. Kemudian program yang akan dilakukan selanjutnya yaitu melakukan penimbunan jalan dengan batu dan pasir pada jalan-jalan yang berlubang terlebih di jalan yang mayoritas dilalui oleh masyarakat nasrani, hal ini ditujukan untuk mempermudah akses masyarakat nasrani menuju ke gereja sehubungan sebentar lagi umat nasrani akan melaksanakan berbagai acara Natal.” (Hasil wawancara 25 November 2022).
  3. Apakah masyarakat sudah merasa puas dengan pembangunan yang telah dibuat oleh pemerintah?  
“..kalau berbicara kepuasan tentu masyarakat belum puas, karena kepuasan setiap masyarakat berbeda-beda, tetapi yang terbaik sudah dilakukan oleh pemerintah desa..” (Hasil wawancara 25 November 2022).

#### IDENTITAS RESPONDEN KEEMPAT

1. Nama : N. Manurung
2. Jenis Kelamin: l Laki - Laki
3. Umur : 60
4. Pekerjaan : Masyarakat
5. Pendidikan : SMA

#### Pertanyaan – Pertanyaan

1. Apakah pemerintah desa mengikutsertakan masyarakat dalam melakukan perencanaan pembangunan?  
“..iya dek, kalau untuk rencana pembangunan memang selalu ada pertemuan, desa memaparkan apa yang mereka ingin lakukan sama kalau ada saran dari masyarakat..” (hasil wawancara 28 November 2022).
2. Program apa yang telah dibuat pemerintah desa untuk menjaga pembangunan yang telah dibuat?  
“.. yaa, betul yang dikatakan ibu ini (ibu R. Sirait) Setelah semua program tersebut dilakukan di hari-hari kedepannya perangkat desa beserta masyarakat mengadakan jumat bersih untuk menjaga keutuhan pembangunan yang telah kita kerjakan sama-sama..” (hasil wawancara 28 November 2022).
3. Apakah masyarakat sudah merasa puas dengan pembangunan yang telah dibuat oleh pemerintah?  
“.. menurut saya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa sudah cukup baik, ya namun alangkah lebih baiknya jika pemerintah desa bisa melakukan pembangunan diseluruh dusun XVI supaya seluruh

masyarakat Desa Pulau Gambar merasa diperhatikan oleh pemerintah desa..” (hasil wawancara 28 November 2022).

#### IDENTITAS RESPONDEN KELIMA

1. Nama : R. Sirait
2. Jenis Kelamin : Perempuan
3. Umur : 55
4. Pekerjaan : Masyarakat
5. Pendidikan : SMA

#### Pertanyaan – Pertanyaan:

1. Apakah pemerintah desa mengikutsertakan masyarakat dalam melakukan perencanaan pembangunan?  
“..setau saya iya dek tapi saya belum pernah menghadirinya, karena saya sibuk bertani disawah, belum punya waktu untuk bergabung dengan yang lain untuk kumpul-kumpul di kantor desa..” (hasil wawancara 24 November 2022).
2. Program apa yang telah dibuat pemerintah desa untuk menjaga pembangunan yang telah dibuat?  
“.. yang saya tau pemerintah desa setiap hari jumatnya mengadakan gotong royong yang dimana dalam kegiatan ini semua tokoh yang telah hadir membantu mengerjakan program-program pembangunan yang telah di rencanakan sebelumnya” (hasil wawancara 24 November 2022) .
3. Apakah masyarakat sudah merasa puas dengan pembangunan yang telah dibuat oleh pemerintah?  
“..kalau dari saya pribadi, saya merasa kurang puas dengan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Saya selaku warga dusun XVI merasa adanya ketidakadilan dalam pemerataan pembangunan, kenapa pemerintah desa tidak mengambil langkah dalam pembangunan jalan di dusun XVI padahal dusun ini masih termasuk dalam desa Pulau Gambar..” (hasil wawancara 24 November 2022).

#### IDENTITAS RESPONDEN KEENAM

1. Nama : S. Cibro
2. Jenis Kelamin : Perempuan
3. Umur : 63
4. Pekerjaan : Masyarakat
5. Pendidikan : SD

#### Pertanyaan – Pertanyaan

1. Apakah pemerintah desa mengikutsertakan masyarakat dalam melakukan perencanaan pembangunan?  
“..Untuk perencanaan pembangunan infrastruktur desa saya rasa sama dengan tahun lalu, hanya saja dalam pelaksanaannya belum begitu optimal

karena mereka saya rasa kurang bisa memprediksi apakah suatu program pembangunan bisa di selesaikan dalam waktu yang singkat atau tidak, dan karena itu lah kebanyakan program pembangunan yang terbengkalai, contohnya saja pembangunan jalan yang tidak selesai sampai sekarang..” (hasil wawancara 28 November 2022).

2. Program apa yang telah dibuat pemerintah desa untuk menjaga pembangunan yang telah dibuat?

“..kalau yang dari saya perhatikan salah satu contoh program pemerintah dalam menjaga kebersihan dan keutuhan Pembangunan yaitu diadakannya jumat bersih yang kita kerjakan sama-sama..” (hasil wawancara 28 November 2022).

3. Apakah masyarakat sudah merasa puas dengan pembangunan yang telah dibuat oleh pemerintah?

“..Perencanaan pembangunan baik infrastruktur maupun yang lainnya sebenarnya sudah dilakukan baik sehingga tidak ada lagi permasalahan dalam perencanaan pembangunan infrastruktur desa ini, memang masih ada infstruktur yang lain yang perlu di bangun tetapi kan tidak mungkin semuanya bisa di selesaikan dalam satu tahun tersebut, masalah seperti kurangnya anggaran ataupun banyaknya waktu dalam menyelesaikan suatu program pembangunan itu juga perlu pertimbangkan..” (hasil wawancara 28 November 2022).

#### IDENTITAS RESPONDEN KETUJUH

1. Nama : N. Manik
2. Jenis Kelamin : Perempuan
3. Umur : 73
4. Pekerjaan : Masyarakat
5. Pendidikan : -

#### Pertanyaan – Pertanyaan

1. Apakah pemerintah desa mengikutsertakan masyarakat dalam melakukan perencanaan pembangunan?

“..iya dek, pada tahapan Musyawarah Desa, pemerintah Desa selalu melibatkan unsur dari masyarakat, meskipun tidak Seluruh masyarakat terlibat namun perwakilan tokoh masyarakat desa selalu kami libatkan. Terkadang kita juga mengupayakan kehadiran masyarakat dengan Mengadakan musyawarah dan menempatkannya dalam acara Jumat bersih..” (hasil wawancara 28 November 2022).

2. Program apa yang telah dibuat pemerintah desa untuk menjaga pembangunan yang telah dibuat?

“..Setau saya programnya itu gotong royong, kita bersihin bersama sama. Biasanya gotong royongnya itu di hari Jumat..” (hasil wawancara 28 November 2022).

3. Apakah masyarakat sudah merasa puas dengan pembangunan yang telah dibuat oleh pemerintah?

UNIVERSITAS MEDAN AREA. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pembangunan ini sudah cukup



puas mengingat pemerintah sudah melakukan sosialisasi terhadap masyarakat dan juga meninjau lapangan pembangunan cuman yang saya bingungkan mengapa hanya dusun XVI yang tidak mengalami pembangunan dari tahun ke tahun ..” (hasil wawancara 28 November 2022).

#### IDENTITAS RESPONDEN KEDELAPAN

1. Nama : R. Berutu
2. Jenis Kelamin: Perempuan
3. Umur : 46
4. Pekerjaan : Masyarakat
5. Pendidikan : SD

#### Pertanyaan – Pertanyaan

1. Apakah pemerintah desa mengikutsertakan masyarakat dalam melakukan perencanaan pembangunan?  
“..iya betul dek, pemerintah desa selalu melibatkan Masyarakat di dalamnya. Bahkan pemerintah melakukan penyerapan aspirasi Dari tingkat musdes, kemudian dilanjutkan melalui musdes, dan yang Terakhir musrembangdes. Memang tidak dipungkiri dalam rapat-rapat Yang dilakukan ditingkat Desa tidak semua masyarakat ikut Terlibat. Namun setidaknya perwakilan setiap dusun mesti kami Undang untuk membahas bersama-sama. Disisi lain masyarakat yang diundang terkadang juga malah tidak Hadir, dengan alasan sibuk, tidak ada uangnya, atau terkadang jenuh Mengikuti rapat, dan lain sebagainya..” (hasil wawancara 28 November 2022).
2. Program apa yang telah dibuat pemerintah desa untuk menjaga pembangunan yang telah dibuat?  
“..Biasanya tiap hari jumat itu kita gotong royong untuk tetap menjaga kebersihan Itulah program yg dibuat pemerintah desa utk menjaga pembangun trsb tetap bagus..” (hasil wawancara 28 November 2022).
3. Apakah masyarakat sudah merasa puas dengan pembangunan yang telah dibuat oleh pemerintah?  
“..sebenarnya pemerintah sudah baik dalam melakukan pembangunan di desa, namun pemerintah memiliki keterbatasan dari segi biaya yang di anggarkan untuk pembangunan. Sepertinya hal itu yang membuat pemerintah desa mengalami kekurangan dalam melakukan pemerataan pembangunan di desa ini..” (hasil wawancara 28 November 2022).

### LAMPIRAN III DOKUMENTASI PENELITIAN



**Gambar 1.1 Dokumentasi Jalan Menuju Dusun XVI**



**Dokumentasi Jalan Dusun XVI**



**Dokumentasi Jalan Dusun XVI**



**Dokumentasi Jalan Dusun XVI**



**Dokumentasi Jalan Dusun XVI**



**Dokumentasi Jalan Dusun XVI**

## UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 17/4/24

Access From ([repository.uma.ac.id](https://repository.uma.ac.id))17/4/24



**Dokumentasi Kantor Desa Pulau Gambar**



**Dokumentasi Bersama Pengurus Kantor Kepala Desa Pulau Gambar**



**Dokumentasi Jalan Dusun X Desa Pulau Gambar**



**Dokumentasi Jalan Dusun VIII Desa Pulau Gambar**



**Dokumentasi Jalan Dusun XIII Desa Pulau Gambar**



**Gambar 4.2: Foto wawancara bersama Informan 1 Bapak Suriadi sebagai Kepala Desa**



**Gambar 4.3: Foto wawancara bersama Informan 2 Bapak Edy Prayitno sebagai Sekretaris Desa**



**Gambar 4.4: Foto wawancara bersama Informan 3 Ibu R. Sirait sebagai Masyarakat**





**Gambar 4.5: Foto wawancara bersama Informan 4 Bapak N. Manurung sebagai Masyarakat**



**Gambar 4.6: Foto wawancara bersama Informan 5 Ibu Tiarna Br.Manurung Sebagai Kepala Dusun XVI**

LAMPIRAN IV  
SURAT RISET LAPANGAN



**UNIVERSITAS MEDAN AREA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Kampus I : Jalan Koliem Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, 7368878, 7364348 ✉ (061) 7368012 Medan 20223  
Kampus II : Jalan Seblabudi Nomor 79 / Jalan Sei Seray Nomor 70 A ☎ (061) 8225602 ✉ (061) 8226331 Medan 20122  
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ\_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 1137 /FIS.1/01.10/X/2022  
Lamp : -  
Hal : Pengambilan Data/Riset

20 Oktober 2022

Yth,  
Ka. Desa Pulau Gambar Kec. Serbajadi Kab. Serdang Bedagai

Di Tempat

Dengan hormat,

Bersama ini kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan rekomendasi dan kesempatan kepada mahasiswa kami dengan data sebagai berikut :

Nama : Lifia Astrina  
N P M : 198510057  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/riset ke Kantor Kepala Desa Pulau Gambar Kec. Serbajadi Kab. Serdang Bedagai, dengan judul Skripsi "*Peran Pemerintah Desa Dalam Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Di Desa Pulau Gambar Kecamatan Serbajadi Kabupaten Serdang Bedagai*"

Perlu kami sampaikan bahwa penelitian dimaksud adalah semata-mata untuk tulisan ilmiah dan penyusunan skripsi, ini merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa tersebut untuk mengikuti ujian sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area

Selanjutnya kami mohon kiranya dapat memberikan kemudahan dalam pengambilan data yang diperlukan dan surat keterangan yang menyatakan bahwa mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data pada Instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



CC : File,-

Scanned by TapScanner

## LAMPIRAN V DAFTAR RIWAYAT LIFIA DUP SINGKAT

Nama : Lifia Astrina  
Tempat dan Tgl Lahir : 10 September 2000  
Agama : Protestan  
Pekerjaan : Mahasiswa

Pendidikan Formal :  
2019 – Sekarang : Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fisipol UMA  
2015 – 2018 : SMA Negeri 1 Galang  
2012 – 2015 : SMP Swasta Pembangunan Galang  
2006 – 2012 : SD Negeri Kedaung Kaliangke 08

Alamat Rumah : Pulau Gambar, dusun XVI  
Kec. Serbajadi, Kab. Serdang Bedagai  
E-mail : lifiaastrina02@gmail.com  
Tlf / Hp : 082282209742

